



Tantangan Masyarakat Transmigran dalam Pelaksanaan Program Transmigrasi di UPT Durian Amparan Kabupaten Bengkulu Utara

Yanmesli, Anggun Dwi Utami, Supriyono, Muhammad Alfi

Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Prof Dr Hazairin SH, Bengkulu

E-mail: memes.maizar@gmail.com

Diterima 30 Oktober 2022, Direvisi 14 November 2022, Disetujui Publikasi 30 Desember 2022

Abstract

ransmigration as a government effort in community development programs in achieving the welfare of transmigrants. However, the findings show that this is different from the theoretical reality with the application of UPT Durian Amparan, because out of 200 heads of households (KK), currently there are only 38 families of original transmigrants. This study aims to evaluate the implementation of the transmigration program which has been implemented since 2004 at UPT Durian Amparan. The case study method for examining in depth was carried out in this study with primary data obtained through in-depth interviews with key informants, observations, and surveys, as well as secondary data obtained from supporting literature. Data analysis was carried out in a qualitative descriptive manner. The results showed that: First, the transmigration program did not run optimally because business land I was handed over in the second year and business land II was not given. Second, low welfare and lack of sustainable livelihood strategies. Third, coaching for the transmigration community was generally only carried out in the first 2 years, because of the 2007 earthquake, extension officers rarely visited the location. Placement of transmigrant locations provides an action that is considered as an effort for the transmigration program to create community welfare, therefore the government's recommendations need to pay attention to and emphasize location determination as a standard in placing transmigrant community policies.

Keywords: *Transmigration, Welfare, Challenges of Transmigrants.*

Abstrak

Transmigrasi sebagai upaya pemerintah dalam program pengembangan komunitas dalam mencapai kesejahteraan transmigran. Namun temuan menunjukkan ini berbeda dengan realita teori dengan aplikasinya UPT Durian Amparan, karena dari 200 Kepala Keluarga (KK), saat ini hanya ada 38 KK transmigran asli. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program transmigrasi yang dilaksanakan sejak 2004 di UPT Durian Amparan. Metode studi kasus untuk mengkaji secara mendalam dilakukan dalam penelitian ini dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi, dan survei, serta data sekunder yang diperoleh dari literatur pendukung. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, program transmigrasi tidak berjalan optimal karena lahan usaha I diserahkan pada tahun kedua dan lahan usaha II tidak diberikan. *Kedua*, Rendahnya kesejahteraan dan kurangnya strategi penghidupan yang berkelanjutan. *Ketiga*, pembinaan masyarakat transmigrasi pada umumnya hanya dilakukan pada 2 tahun pertama, karena gempa bumi 2007, petugas penyuluh sudah sangat jarang ke lokasi. Penempatan lokasi transmigran memberikan suatu tindakan yang dipertimbangkan sebagai upaya program transmigrasi dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu rekomendasi pemerintah perlu memperhatikan dan menekankan penentuan lokasi sebagai standarisasi dalam menempatkan kebijakan masyarakat transmigran.

Kata Kunci: Transmigrasi, Kesejahteraan, Tantangan Transmigran

A. Pendahuluan

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan serta menetap di wilayah lokasi pengembangan permukiman transmigrasi (UU No. 15/1997 tentang ketransmigrasian). Soegiharto (2009) mengemukakan bahwa penyelenggaraan transmigrasi adalah rangkaian kegiatan yang terdiri dari penyiapan permukiman yang diawali dari perancangan wilayah lokasi transmigrasi, penempatan transmigran disertai dengan pelatihan, dan pengembangan transmigran yang diakhiri dengan penetapan lokasi tersebut sebagai desa definitif, yang merupakan desa bentukan transmigrasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2/1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, program transmigrasi dijalankan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, untuk memeratakan pembangunan antar wilayah dengan membentuk pusat pertumbuhan wilayah baru atau mendukung percepatan pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau sedang berkembang. Transmigrasi dijalankan sebagai bentuk mobilitas penduduk lewat penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan pemanfaatan sumberdaya alam sesuai daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta sebagai wahana integrasi dan akulturasi budaya. Transmigrasi dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dengan menciptakan kesempatan kerja serta mendorong perluasan dan pengembangan investasi baru.

Husodo (2003) menjelaskan bahwa tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan transmigran adalah bagaimana meningkatkan peran transmigran dalam konteks pembangunan daerah tujuan transmigrasi, termasuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat di sana. Apabila dilihat dari lingkungan fisik, pada umumnya daerah yang ditetapkan sebagai tujuan

transmigrasi adalah daerah baru dengan kondisi lapangan yang relatif berat serta daya dukung lahan yang relatif rendah. Sebagai daerah yang direncanakan menjadi permukiman baru, banyak hal seperti sarana, prasarana dan potensinya tidak tersedia.

Penelitian ini dilakukan terhadap program transmigrasi yang dilaksanakan sejak 2004 di Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Durian Amparan Kabupaten Bengkulu Utara,

Selanjutnya penelitian ini dilakukan dalam ranah kajian geografis, yaitu mengkaji secara deskriptif berbagai cara tentang keterkaitan subsistem lingkungan fisik dengan persebaran manusia dalam hubungannya dengan faktor lingkungan fisik serta dengan manusia lainnya (Ritohardoyo, 2013). Di antara tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam geografi, penelitian ini menekankan pada kajian ekologi, yaitu keterkaitan antara manusia dengan lingkungannya (Ritohardoyo, 2013), tetapi tetap didukung pula dengan pendekatan lainnya, yaitu keruangan dan kompleks wilayah.

Pada kajian lingkungan, kajian geografis ini menekankan pada aspek fisik dari lokasi transmigrasi, sedangkan pada kajian manusia, kajian geografis ini lebih menekankan pada aspek ekonomi, sosial dan budaya, yang sama-sama dikaitkan dengan kesejahteraan transmigran dan strategi penghidupan yang mereka terapkan dalam mencapai kesejahteraan tersebut. Menurut Alfandi (2001), hubungan antara manusia dengan lingkungan merupakan hubungan dua arah karena masing-masing saling mempengaruhi. Artinya, manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam berfungsi sebagai pengubah dan pemelihara lingkungan hidup, tetapi agar lestari, mereka harus melaksanakan suatu kegiatan pembangunan di suatu tempat dengan memenuhi persyaratan kelayakan fisik, ekonomi, sosial, dan budaya tanpa ada dampak yang merusak terhadap

lingkungan. Dalam konteks program transmigrasi yang telah dilaksanakan sejak 2004 di UPT Durian Amparan Kabupaten Bengkulu Utara, lingkungan ekologis maupun ekonomi, sosial dan budaya merefleksikan lingkungan dari lokasi permukiman transmigrasi itu sendiri.

Pertimbangan yang mendasari program transmigrasi yang dilaksanakan di UPT Durian Amparan Kabupaten Bengkulu Utara memang ideal sebagai usaha pemenuhan hak-hak dan hasrat asasi manusia akan kondisi hidup yang jauh lebih baik, dalam pengertian sejahtera, baik bagi individu, keluarga maupun masyarakat transmigran sendiri. Hanya saja, ada banyak faktor yang mempengaruhi masih rendahnya capaian kesejahteraan di lokasi transmigrasi dan tak semua transmigran mampu menjalani kehidupannya dengan daya adaptasi yang tinggi. Kesejahteraan transmigran dan strategi penghidupan yang mereka terapkan secara berkelanjutan sangat penting dalam menentukan derajat keberhasilan program transmigrasi yang dilaksanakan sejak 2004 di UPT Durian Amparan Kabupaten Bengkulu Utara. Idealnya, program transmigrasi di UPT Durian Amparan mampu meningkatkan kesejahteraan sekaligus pengembangan wilayah menjadi klaster wilayah perkotaan yang jauh lebih maju.

Dalam praktiknya, Berdasarkan observasi awal di lapangan November 2010, khususnya di UPT Durian Amparan Kabupaten Bengkulu Utara, diduga kurang optimalnya pembinaan yang diberikan pemerintah provinsi kepada transmigran mendorong sebagian dari mereka meninggalkan lokasi. Dari 200 Kepala Keluarga (KK), saat ini hanya ada 85 KK, yaitu 72 KK dari 75 KK transmigran asal Pasuruan Jawa Timur, 2 KK dari 25 KK transmigran asal DKI Jakarta, dan 11 KK dari 100 KK Transmigran Penduduk Setempat (TPS). Artinya, 115 KK dari 200 KK memilih meninggalkan lokasi transmigrasi untuk

kembali ke daerah asal atau ke daerah lainnya. Hal ini secara implisit mengindikasikan adanya persoalan yang dialami oleh transmigran sehubungan dengan relatif rendahnya kesejahteraan hidup. Dari perspektif ekologis, kondisi ini terjadi akibat kurang harmonisnya interaksi antara transmigran di lokasi transmigrasi dengan lingkungan di sekitarnya, baik fisik, ekonomi, sosial maupun budaya, yang mendorong mereka meninggalkan lokasi UPT. Dengan perspektif ini, kajian geografis mengenai program transmigrasi, terutama interaksi manusia dan lingkungan sekitarnya di lokasi transmigrasi, perlu dilakukan dalam hubungannya dengan capaian kesejahteraan transmigran dan strategi penghidupan yang diterapkan dalam mencapai kesejahteraan tersebut, dengan rumusan masalah sebagai berikut: "bagaimana program transmigrasi yang telah dilaksanakan di UPT Durian Amparan Kabupaten Bengkulu Utara periode 2004-2013?"

Berdasarkan observasi pendahuluan di lapangan bahwa kesejahteraan hidup warga transmigran bukan hanya dipengaruhi usaha internal di kalangan mereka sendiri, usaha eksternal dalam proses interaksi mereka dengan penduduk setempat atau usaha struktural dalam upaya meningkatkan produktivitas ekonomi dari lahan usahatani perkebunan yang mereka olah, melainkan seringkali dipengaruhi pula oleh keterlibatan institusional dalam memberi bantuan keuangan, fasilitasi teknologi menengah tepat guna, penyuluhan atau peraturan perundang-undangan pendukung peningkatan produktivitas ekonomi transmigran, seperti kebijakan Kota Terpadu Mandiri (KTM). Kehadiran pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan transmigrasi di berbagai unit yang ada juga menimbulkan rasa aman dan memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan transmigran. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah perlu diperhatikan dalam

kajian tentang program transmigrasi yang telah dilaksanakan sejak 2004 di UPT Durian Amparan Kabupaten Bengkulu Utara. Ini karena berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan transmigrasi yang dilaksanakan di UPT Durian Amparan Kabupaten Bengkulu Utara sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah.

B. Kajian Pustaka

1. Program Transmigrasi

Menurut Husodo (2003), program transmigrasi adalah program di mana pemerintah aktif terlibat langsung memindahkan penduduk berjumlah besar untuk menyeberangi laut antar pulau dari Pulau Jawa, Bali dan Madura ke pulau-pulau besar luar Pulau Jawa, Bali dan Madura. Keterlibatan aktif yang berlangsung terus-menerus dalam waktu cukup lama ini justru menjadi unik dan sangat khas Indonesia sebagai negara kepulauan, di mana pemindahan penduduk bukan terjadi diantara daerah-daerah di suatu daratan (*resettlement*) melainkan antarpulau, dan menyeberangi laut, dalam hal ini Pulau Jawa, Bali dan Madura yang berpenduduk padat ke pulau-pulau besar lain yang berpenduduk tidak padat. Sejak masa Orde Baru, transmigrasi adalah program pemindahan penduduk yang terbesar di dunia yang dikelola oleh pemerintah (Levang, 2003). Kasus ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program transmigrasi pernah menjadi salah satu program demografis sangat penting bagi pengaturan kependudukan di Indonesia.

2. Program Transmigrasi dari Perspektif Geografi

Secara umum dapat dikemukakan bahwa geografi merupakan ilmu yang melakukan pendekatan secara menyeluruh dengan kajian keruangan, ekologi, dan kewilayahan dalam mendiskripsikan dan menganalisis struktur pola, fungsi, dan proses interaksi atau hubungan timbal-

balik dari serangkaian kejadian kehidupan dengan keadaan lingkungannya (Alfandi, 2001). Interaksi dapat terjadi antara manusia dengan manusia maupun manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Salah satu tujuan kajian geografi adalah untuk memahami sifat atau ciri wilayah, potensi, dan sumberdaya alam yang terdiri dari aspek-aspek fisik, sosial, budaya, ekonomi, politik, kependudukan, dan sebagainya (Bintarto, 1991). Studi geografi mengkaji hubungan atau interaksi antara manusia dengan lingkungannya dengan menekankan pada variasi fenomena dari suatu tempat dengan tempat lainnya dan menjelaskan kenampakan yang berbeda antar waktu dalam lokasi.

Dari berbagai fenomena, maka dapat dikenali distribusi keruangannya, sehingga hubungan antarfenomena dan variasinya dapat dikaji dengan berbagai pendekatan, metode, dan alat analisis, terutama tentang hubungan antara manusia dan lingkungannya. Dalam kerangka interaksi tersebut, ada tiga pendekatan yang dikenal dalam geografi terpadu sebagaimana diperkenalkan oleh Hagget (dalam Bintarto dan Hadisumarno, 1987) dalam memahami suatu permasalahan geografi, yaitu: analisis keruangan, analisis ekologi, dan analisis kompleks wilayah.

a. Analisis keruangan (*spatial analysis*)

Analisis keruangan mempelajari perbedaan lokasi mengenai berbagai sifat penting atau serangkaian sifat-sifat penting suatu wilayah. Aspek yang ditekankan di dalam analisis keruangan adalah faktor-faktor apakah yang menguasai pola-pola penyebaran dan bagaimana pola-pola tersebut diubah agar penyebarannya menjadi lebih efisien dan wajar. Analisis keruangan setidaknya memperhatikan dua hal, yaitu penyebaran penggunaan ruang yang telah ada dan penyediaan ruang yang akan digunakan untuk berbagai kegunaan yang dirancang. Dalam analisis ini, dikumpulkan data lokasi yang terdiri dari data titik (*point*

data) dan data bidang (*areal data*). Data titik meliputi data yang digolongkan ke dalam data bidang adalah data luas hutan, data luas daerah pertanian, data luas padang alang-alang dan lain sebagainya.

Dalam merancang pemukiman transmigrasi, data lokasi dikumpulkan seperti ketinggian tempat, data sampel tanah, data tempat ditemukannya sumber air, data sampel kemiringan lereng, data curah hujan dan sebagainya. Selain itu, dikumpulkan juga data bidang seperti data luas hutan dan data luas padang alang-alang yang dapat diperoleh dari foto udara, data penyebaran pemukiman yang telah ada, dan sebagainya. Dalam perancangan pemukiman transmigrasi, yang perlu diperhatikan adalah persyaratan minimum tingkat kesuburan tanah dan kemiringan daerah maksimum 8%. Dua sifat penting ini diperoleh dari data bidang yang semula diperoleh dari data titik. Rancangan wilayah ini berarti akan mengubah pola wilayah itu secara keseluruhan agar menjadi lebih efisien, yaitu dengan merancang daerah pemukiman, daerah pertanian, daerah pusat pemerintahan, daerah kuburan, daerah jaringan jalan, daerah yang harus tetap tertutup hutan, daerah cadangan dan lain sebagainya.

b. Analisis ekologi (*ecological analysis*)

Ekologi berasal dari kata Yunani *eco* yang berarti rumah atau rumah tangga yang diumpamakan sebagai suatu keluarga yang hidup bersama dan saling mengadakan interaksi di antara anggota keluarga tersebut. Manusia adalah satu komponen dalam organisme hidup yang penting dalam proses interaksi. Analisis ekologi banyak mengkaji serta memberikan interpretasi hubungan antara manusia dengan lingkungannya.

Lingkungan hidup manusia dapat digolongkan ke dalam beberapa kelompok, antara lain: lingkungan fisik (*physical environment*), lingkungan biologis (*biological environment*) dan lingkungan sosial (*social environment*).

Lingkungan fisik adalah segala sesuatu disekitar manusia yang berbentuk mati seperti pegunungan, sungai, udara, air, sinar matahari, kendaraan, rumah dan lain sebagainya. Lingkungan biologis berupa organisme hidup selain dari manusia itu sendiri, seperti hewan, tumbuhan, jasad renik dan lain sebagainya. Sedangkan lingkungan sosial mempunyai beberapa aspek seperti sikap kemasyarakatan, sikap kejiwaan, sikap kerohanian dan lain sebagainya.

Dinamika di lingkungan sosial dapat menimbulkan perubahan gagasan manusia sehingga dapat menimbulkan penyesuaian dan pembaharuan sikap dan tindakan terhadap lingkungan dimana dia hidup. Di pihak lain lingkungan fisik di mana manusia hidup dapat mengalami perubahan bentuk dan fungsi akibat campur tangan manusia. Penggalan dan pengolahan sumberdaya alam merupakan faktor kunci dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sumberdaya alam kehutanan dan perkebunan dapat dikombinasikan dengan program transmigrasi dalam mengerakkan perekonomian lokal dan mendorong pembangunan ekonomi nasional (Suparno, 2007). Wilayah hutan subur yang belum dikelola bisa dijadikan sebagai lahan pertanian transmigran dalam upaya persebaran penduduk. Keberhasilan dari pertanian transmigran ditentukan oleh kesuburan tanah, karena ada banyak jenis tanah yang cocok atau tidak cocok untuk lahan pertanian di lokasi transmigrasi seperti tanah gambut, tanah sulfat asam, alluvial podsolik, dan latosol (Husodo, 2003).

c. Analisis kompleks wilayah (*regional complex analysis*)

Analisis kompleks wilayah merupakan kombinasi antara analisis keruangan dan analisis ekologi. Wilayah-wilayah tertentu didekati dengan pengertian *areal differentiation*, yaitu suatu anggapan bahwa interaksi antar wilayah akan berkembang karena pada

hakekatnya suatu wilayah berbeda dengan wilayah yang lain. Analisis kompleks wilayah juga memperhatikan penyebaran fenomena tertentu (analisis keruangan) dan interaksi antara variabel manusia dan lingkungannya untuk kemudian dipelajari kaitannya.

Secara umum, wilayah merupakan bagian permukaan bumi yang dapat dibedakan dalam hal-hal tertentu dari daerah di sekitarnya. Klasifikasi wilayah menurut jenisnya menekankan pada jenis sesuatu wilayah seperti wilayah iklim, wilayah pertanian, wilayah vegetasi, wilayah fisiografi, dan sebagainya. Klasifikasi wilayah menurut kekhususannya merupakan daerah tunggal yang mempunyai ciri-ciri geografi yang khusus terutama ditentukan oleh lokasinya dalam kaitannya dengan daerah lain, seperti wilayah Asia Tenggara.

Analisis kompleks wilayah mengkaji batas wilayah administrasi dan fungsional, karena perbedaan administratif dan fungsional antar wilayah ini memungkinkan terjadinya hubungan kerjasama peningkatan kesejahteraan warga daerah yang saling terkait. Hal ini dapat terwujud dengan pembangunan berkelanjutan, dengan konsep sebagaimana berakar pada wacana integrasi antara ekonomi dan ekologi (WCED, 1987; Panayotou, 1994), seperti melalui pelaksanaan transmigrasi.

3. Kebijakan Transmigrasi

Menurut Faturochman *et al.* (2004), di era Orde Baru bahkan sampai sekarang ada tiga masalah pokok selalu muncul dalam setiap diskusi mengenai dinamika kependudukan Indonesia, yaitu jumlah penduduk besar, pertumbuhan penduduk relatif tinggi, dan distribusi penduduk tidak merata. Sejak dekade 1970-an, Pemerintah Orde Baru sudah berusaha untuk mengatasi persoalan struktural ini dengan program transmigrasi, dengan harapan dapat mempengaruhi distribusi penduduk di Indonesia.

Paradigma yang awalnya dominan mempengaruhi program transmigrasi di Indonesia adalah bahwa transmigrasi merupakan sarana penyebaran penduduk dari Pulau Jawa, Madura dan Bali yang berpenduduk padat ke luar Pulau Jawa, Madura dan Bali yang berpenduduk jarang. Paradigma ini pula yang mendasari konsep transmigrasi seperti dikenal sekarang, yaitu perpindahan penduduk antar-pulau dengan menyeberangi laut, bukan antar-daratan. Program ini diprakarsai pemerintah karena pelaksanaannya memerlukan biaya sangat besar, khususnya pada tahap perambahan serta pembukaan lokasi baru di luar Pulau Jawa, Madura dan Bali.

Husodo (2003) menyatakan bahwa selain mendukung pengembangan perekonomian berbagai daerah dan perekonomian nasional, penyebaran penduduk melalui transmigrasi juga diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah yang diakibatkan oleh kepadatan penduduk seperti di Pulau Jawa. Kepadatan penduduk di pulau ini telah menimbulkan banyak masalah sosial dan ekonomi, serta menjadi penyebab kemiskinan penduduk, yang ditandai oleh bertambahnya jumlah buruh tani, petani gurem, nelayan miskin, dan para penganggur. Kondisi terlalu padatnya penduduk di Pulau Jawa ini sangat dirasakan dalam kehidupan sektor pertanian di perdesaan. Berbagai lahan usaha para petani yang semakin sempit menyebabkan budidaya pertanian menjadi kurang produktif dan tidak efisien. Karena penduduk di pulau ini sudah terlalu padat, maka kepemilikan lahan semakin sempit. Hal ini menggambarkan betapa tingginya tekanan penduduk terhadap lahan pertanian di Pulau Jawa. Oleh karena itu, perlu disediakan lahan pertanian yang luas dengan tingkat kesuburan yang memadai, salah satunya melalui program transmigrasi.

Berkaitan dengan maksud transmigrasi, dapat dikemukakan bahwa tujuan program transmigrasi yang juga

menonjol adalah pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia di pulau-pulau besar Indonesia dan penyaluran potensi sumber daya manusia dalam peningkatan kesejahteraan dan pembangunan wilayah di negara ini. Husodo (2003) mengemukakan bahwa sebenarnya program transmigrasi merupakan kegiatan investasi baik investasi manusia (*human investment*) maupun investasi modal (*capital investment*). Sebagai proyek investasi manusia, program transmigrasi memberikan dampak positif dalam bentuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup transmigran serta masyarakat sekitarnya, sedangkan sebagai investasi modal, program transmigrasi memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan produk domestik regional bruto tingkat wilayah, baik level provinsi, kabupaten, kecamatan maupun desa.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian studi kasus. Dengan metode ini, peneliti ingin mengungkapkan secara lebih mendalam berbagai aspek problematis unik dari program transmigrasi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2004 sampai tahun 2013 di UPT Durian Amparan. Studi kasus dipilih sebagai metode penelitian ini karena metode itu dapat digunakan untuk mengkaji fenomena spesifik secara mendalam sesuai dengan situasi maupun kondisi yang unik di lokasi penelitian, yaitu di UPT Durian Amparan.

Metode penelitian studi kasus mempunyai beberapa kelebihan. *Pertama*, fokus penelitian studi kasus mengangkat isu-isu kontekstual serta mengeksplorasi dan memahami pemikiran serta pengalaman yang digagas oleh seseorang secara subyektif. *Kedua*, ketika di lapangan ada data menarik tetapi berada di luar teori, data itu dapat digunakan untuk mengembangkan dan menambah kekayaan teori yang telah digunakan asalkan logika yang dibangun antara data dengan teori itu rasional. *Ketiga*, tinjauan

pustaka dalam studi kasus tidak berfungsi menjawab apa yang diketahui tentang suatu topik, melainkan untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam dan mengarah untuk menyingkap seluruh fenomena yang spesifik dan unik secara mendalam mengenai topik yang bersangkutan.

Studi kasus yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus mendalam pada satu kasus. Dengan metode ini, penelitian memusatkan perhatian pada fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2011), dalam hal ini berkaitan dengan program transmigrasi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2004 hingga tahun 2013 di UPT Durian Amparan. Penelitian ini tidak melihat perbandingan atau menggeneralisasi antara kasus yang terjadi di UPT Durian Amparan dengan kasus di daerah lainnya. Hal ini dilakukan agar penelitian ini dapat mengupas secara mendalam kasus yang terjadi di UPT tersebut dengan mengedepankan keunikan dan kekhususan di sana. Mengingat terbatasnya waktu, dana, dan kemampuan untuk mengumpulkan data penelitian, metode studi kasus dipilih agar lingkup data yang dikumpulkan menjadi terbatas dan spesifik. Dengan data itu, diharapkan analisis, pembahasan dan penyajian data dapat dilakukan secara lebih fokus terhadap segala keunikan dan kekhususan yang ditemukan di lapangan mengenai program transmigrasi yang telah dilaksanakan sejak 2004 hingga tahun 2013 di UPT Durian Amparan.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Program Transmigrasi di UPT Durian Amparan

Pelaksanaan transmigrasi di UPT Durian Amparan tidak dapat dilepaskan dari kebijakan ekonomi berbasis persoalan kependudukan di Provinsi Bengkulu pada umumnya dan Kabupaten Bengkulu Utara pada khususnya. Mengingat banyaknya sumberdaya perkebunan di wilayah ini, pengelolaan

sumberdaya alam yang melimpah membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah banyak, dan alternatif utama untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan adalah melalui transmigrasi.

Program transmigrasi ini membutuhkan dukungan SDM yang cukup, baik kualitas maupun kuantitas. Kualitas SDM berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah SDM apakah sudah cocok untuk memenuhi semua kebutuhan (Widodo, 2011). SDM berpengaruh terhadap keberhasilan program transmigrasi, sebab tanpa SDM yang handal maka program transmigrasi akan berjalan lambat. Hal ini terkait dengan tiga kecamatan tetangga yang sudah berkembang terlebih dulu menjadi sentra ekonomi masyarakat sekitar, yang pada akhirnya sekarang sudah dibentuk menjadi KTM Lagita.

Dari demikian banyak program transmigrasi yang dilaksanakan selama ini, pemerintah menetapkan kebijakan pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 214/ MEN/V/2007 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan KTM di Kawasan Transmigrasi. Dengan kebijakan ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu mengusulkan dilaksanakannya pembangunan dan pengembangan KTM Lagita di Kabupaten Bengkulu Utara, yaitu kawasan pengembangan wilayah transmigrasi yang mencakup kecamatan, seperti Ketahun, Napal Putih, Giri Mulya, Batik Nau, Padang Jaya, dan Lais. UPT Durian Amparan merupakan salah satu lokasi transmigrasi di wilayah KTM Lagita Kecamatan Batik Nau. Hal ini menunjukkan bahwa transmigrasi di UPT Durian Amparan adalah respon Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara terhadap perkembangan yang positif di kawasan ekonomi terpadu berbasis transmigrasi di KTM Lagita.

Sesuai dengan tujuan pembangunan KTM Lagita, transmigrasi di UPT Durian Amparan juga diarahkan pada pengembangan lokasi transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan wilayah berbasis komoditas pertanian dan agroindustri, serta dilengkapi kawasan pengembangan agribisnis (Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, 2007). Dengan orientasi semacam itu, pengembangan perkebunan di UPT Durian Amparan mempunyai fokus ekonomi yang relatif jelas. Lahan usaha tani yang dibagikan kepada transmigran umumnya berupa lahan pekarangan seluas 50 Ha, sedangkan Lahan Usaha I yang dibagikan adalah seluas 150 Ha. Lahan yang diberikan pada warga transmigran di UPT Durian Amparan umumnya digunakan untuk menanam tanaman karet. Kondisi lahan yang berbukit-bukit umumnya mendorong perkembangan perekonomian di UPT Durian Amparan mengarah pada perekonomian berbasis budidaya lahan kering.

Secara umum dapat dikatakan bahwa program transmigrasi yang telah dilaksanakan di UPT Durian Amparan melibatkan beberapa lembaga di antaranya adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Pemerintah Kecamatan Batik Nau, dan Kantor Desa Durian Amparan Lama, serta perusahaan penerima otoritas untuk membuka lahan dan membangun sarana dan prasarana fisik yang diperlukan oleh transmigran seperti rumah tinggal, kantor petugas penyuluh transmigrasi, sekolah dan Puskesmas Pembantu (PUSTU).

Sebagai penerima dan pelaksana program transmigrasi, mereka lebih banyak terlibat mulai dari mempersiapkan lahan transmigrasi sampai pada menempatkan transmigran ke lokasi UPT Durian Amparan. Pada tingkat provinsi, Pemerintah Daerah melaksanakan tugas umum menerima dan menampung calon transmigran di asrama transit. Sejak tahap penerimaan, Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi (Disnakertrans) telah memberikan informasi mengenai daerah yang akan mereka datangi dan memberikan arahan bagaimana calon transmigran akan diantar ke kabupaten hingga akhirnya diantar ke lokasi transmigrasi.

Dalam penerimaan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu ini, Disnakertrans juga telah menjelaskan hak dan kewajiban transmigran di lokasi yang ditentukan di UPT Durian Amparan. Transmigran dijanjikan akan menerima hak antara lain: (1) menerima lahan 2 ha, yaitu 0,25 ha untuk lahan rumah dan pekarangan dan 0,75 ha untuk Lahan Usaha I, serta 1 ha untuk Lahan Usaha II; (2) mendapat jatah hidup selama satu tahun, yaitu beras, gula, kopi, garam, ikan asin, dan lain-lain setiap bulan; (3) penyuluhan tentang bagaimana menyesuaikan diri dengan lokasi baru, cara menggarap lahan yang telah disediakan, serta jenis-jenis tanaman yang cocok ditanam di daerah tersebut, dan sebagainya; dan (4) diberi pendampingan pembinaan di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang diberikan selama 5 tahun oleh petugas Disnakertrans yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

Disnakertrans Provinsi Bengkulu telah menyampaikan pula kewajiban umum transmigran untuk selalu menempati lokasi yang telah ditetapkan dan mengolahnya sesuai dengan penyuluhan pertanian yang diberikan, serta dilarang untuk menjual kepada orang lain dan/atau meninggalkan lokasi yang telah diberikan. Dalam rangka memenuhi kewajiban transmigran ini, pihak Disnakertrans Provinsi Bengkulu juga menyampaikan peran utama sebagai pembina transmigran dalam beberapa tahapan selama 5 tahun berturut-turut, dan peran fasilitator bagi semua bantuan tambahan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada warga transmigran, sampai mereka benar-benar dapat menjadi transmigran yang sejahtera dan mandiri secara ekonomi.

Selain Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara juga melaksanakan tugas menerima penyerahan transmigran dari Provinsi Bengkulu untuk diantarkan ke lokasi yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan tugas-tugas pembinaan di lapangan, Disnakertrans Kabupaten Bengkulu Utara menunjuk petugas lapangan yaitu seorang kepala UPT yang nantinya akan bertugas mendampingi pembinaan transmigran selama 5 tahun pertama sejak penempatan, dengan tugas menjadi fasilitator antara pemerintah dan transmigran. Disnakertrans maupun petugas lapangan urusan transmigrasi juga menjelaskan berbagai urusan administrasi yang harus diurus oleh transmigran setelah mereka menempati lokasi yang ditetapkan.

Pemerintah Daerah (dari tingkat provinsi sampai desa) selaku penerima dan pelaksana kebijakan transmigrasi berusaha menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat diketahui dari pemberian informasi yang jelas kepada pihak terkait, seperti tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah (Disnakertrans) dalam penerimaan dan penampungan calon transmigran di asrama transit sampai transmigran diantar ke lokasi pemukiman di UPT Durian Amparan. Disnakertrans Provinsi juga memberi informasi yang jelas kepada calon transmigran tentang hak dan kewajiban mereka di UPT, serta kewajiban dari Disnakertrans Provinsi untuk mendampingi dan membina transmigran selama lima tahun berturut-turut.

2. Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Lokasi Transmigrasi

Pemerintah daerah asal (Pasuruan Jawa Timur dan DKI Jakarta) maupun pemerintah daerah penerima (Provinsi Bengkulu) pada umumnya mempunyai prakarsa yang sama untuk mengadakan transmigrasi. Di satu sisi, pemerintah daerah asal ingin warga miskin di

lingkungan padat penduduk dari daerahnya dapat meningkatkan taraf hidup di lokasi transmigrasi melalui pengelolaan lahan perkebunan, sementara di sisi lain, pemerintah daerah penerima membutuhkan tenaga kerja tambahan untuk terlibat dalam pengelolaan sumberdaya perkebunan di lokasi transmigrasi. Adanya kebutuhan akan program transmigrasi dari perspektif yang berbeda tersebut telah menimbulkan peranan yang berbeda dalam pelaksanaan program transmigrasi di UPT Durian Amparan, namun demikian mereka memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan taraf kehidupan warga di sana.

Komunikasi antar daerah pengirim dan daerah penerima selama ini kurang berjalan dengan baik. Pemerintah daerah pengirim pada umumnya hanya berperan di masa persiapan dan pembekalan calon transmigran serta proses pengirimannya ke pemerintah daerah penerima. Setelah penempatan di UPT Durian Amparan, pemerintah daerah asal tidak banyak terlibat dan sudah menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah penerima. Sementara itu, pemerintah daerah penerima pada umumnya terlibat dalam menyiapkan lokasi transmigrasi, menerima calon transmigran, memberikan arahan mengenai kondisi lokasi transmigrasi dan cara menyikapinya, serta memberikan penyuluhan tentang budidaya tanaman yang cocok dengan lahan di sana. Pemerintah daerah pengirim dan pemerintah daerah penerima seharusnya tetap bekerjasama, terutama dalam pembinaan transmigran agar mereka dapat mengembangkan kehidupan yang lebih baik di UPT.

Pemerintah daerah provinsi telah menunjuk seorang stafnya yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) untuk menjadi Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi (Ka. UPT) di lokasi transmigrasi. Penunjukkan Ka. UPT merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah daerah dalam proses pembinaan

transmigran selama lima tahun berturut-turut. Transmigran juga bertanggung jawab dalam menciptakan lokasi UPT menjadi wilayah transmigrasi yang berwawasan lingkungan, serta menjadi wilayah yang pertumbuhan ekonominya menjadi andalan bagi penduduk sekitarnya dengan cara mengolah dan memelihara UPT sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Selama ini, pengelolaan lokasi transmigrasi di UPT Durian Amparan telah melibatkan peran pemerintah daerah penerima, khususnya pada tahun-tahun awal penempatan transmigran melalui pemberian jatah hidup selama satu tahun serta pemberian penyuluhan ketransmigrasian. Pendampingan dan pembinaan ini telah dilakukan sesuai dengan jenis transmigrasi dan pola usaha pokoknya. Pemerintah daerah yang menerima transmigran memiliki peran yang sangat strategis mulai dari persiapan program sampai pembinaan transmigran (Soegiharto, 2008). Namun, pemerintah daerah penerima, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Bengkulu pada umumnya dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara pada khususnya, kurang melaksanakan peran strategisnya secara optimal, baik dalam hal penyediaan lahan, penyiapan permukiman, informasi, seleksi, pendidikan dan pelatihan atau pun pembinaan masyarakat dan permukiman transmigrasi.

a. Penyediaan Lahan

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara No. 660/2003 tentang penetapan/penunjukan pencadangan tanah untuk lokasi pemukiman transmigrasi di Kecamatan Batik Nau Bengkulu Utara, menetapkan pencadangan tanah seluas lebih kurang 600 Ha. Namun prakteknya di lapangan, tanah atau lahan yang diserahkan kepada transmigran sejak mereka ditempatkan hingga sekarang baru sekitar 200 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan lahan

untuk warga transmigran mengalami kendala dan masalah yang rumit.

Pada saat penempatan transmigran, pemerintah daerah hanya memberikan lahan seluas 0,25 hektar untuk rumah dan pekarangan, dan tidak segera disusul dengan pemberian Lahan Usaha I agar dapat segera dikelola. Lahan Usaha I di UPT Durian Amparan umumnya baru diberikan setelah transmigran di lokasi selama satu tahun lebih, bahkan terdapat 30 Kepala Keluarga transmigran belum memperoleh lahan seluas 0,75 Ha tersebut terhitung dengan masa tunggu selama delapan tahun hingga Desember 2013. Lahan Usaha II yang dijanjikan akan diberikan setelah setahun penempatan ternyata tidak diberikan juga sampai sekarang, imbasnya warga mengalami kesulitan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada ketidakjelasan dan tidak konsistennya informasi yang diberikan oleh pelaksana kebijakan transmigrasi di UPT Durian Amparan. Sumber daya yang digunakan untuk keberhasilan program transmigrasi ini jelas sangat terbatas, seperti SDM berupa staf pelaksana yang kurang profesional dan kurang mempunyai dedikasi tinggi dalam menjalankan kebijakan program transmigrasi. Selain itu, struktur birokrasi yang panjang dan rumit serta kompleks mengakibatkan penyelenggaraan program transmigrasi di UPT ini tidak fleksibel.

Dampak buruk lemahnya peran penyediaan lahan oleh pemerintah daerah-penerima adalah bahwa transmigran menjadi sangat enggan mengelola lahan dengan baik demi produktivitas yang optimal, karena belum diterimanya lahan usaha II serta lemahnya status kepemilikan lahan yang mereka kelola. Pemerintah daerah sendiri tidak memberi kepastian hukum tentang status lahan yang mereka kelola, bahkan sampai akhir Desember 2013. Hal ini menandakan adanya indikasi inkonsistensi penerapan mekanisme penyerahan lahan kepada transmigran.

Penyiapan permukiman di UPT Durian Amparan ini masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan transmigran, yang dapat dilihat dari beberapa aspek: (1) wujud rumah yang diterima oleh transmigran sangat sederhana, baik bentuk, bahan maupun tataruangnya. Rumah ini dibangun di atas lahan rumah dengan kondisi pekarangan yang dibiarkan tanpa pengelolaan; (2) letak rumah yang jauh satu sama lain, sehingga potensi saling bertemu dan berinteraksi satu sama lain menjadi sangat terbatas; (3) posisi sarana dan prasarana sekolah, kesehatan dan pemerintahan berada jauh di luar lingkup interaksi masyarakat; dan (4) kondisi lahan yang dikelola, baik pada lahan rumah dan pekarangan seluas 0,25 hektar maupun Lahan Usaha I yang diberikan pada awal tahun kedua seluas 0,75 hektar, masih apa adanya dan idealnya harus dikelola beberapa bulan lebih dahulu sebelum ditanami karet.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan Disnakerstran dalam penyiapan permukiman benar-benar minimalis, bahkan dapat dikatakan kurang memadai dalam mendukung penciptaan lingkungan lokasi transmigrasi yang nyaman dan sejahtera. Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam implementasi program transmigrasi ini. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti pemukiman, sekolah, kantor transmigrasi, PUSTU, mesjid, lahan usaha, listrik, sumber air bersih, jalan dan fasilitas lainnya akan menunjang dalam keberhasilan pelaksanaan program transmigrasi di UPT Durian Amparan. Anggaran yang terbatas untuk pembebasan lahan serta penyediaan sarana dan prasarana sangat besar pengaruhnya untuk dapat menjamin kebijakan berjalan sesuai dengan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

b. Pembinaan Transmigran

Pembinaan warga transmigrasi pada dasarnya diarahkan untuk mencapai

kesejahteraan, kemandirian, serta integrasi transmigran dengan penduduk sekitar dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Pembinaan warga transmigran maupun lingkungan permukiman transmigrasi oleh pemerintah daerah penerima Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara di UPT Durian Amparan meliputi bidang ekonomi, khususnya untuk menuju tingkat swasembada berbasis perkebunan tanaman karet. Di bidang sosial-budaya, pembinaan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pelayanan umum dan terjadinya integrasi serta akulturasi yang menyeluruh antara transmigran dan masyarakat sekitarnya. Pembinaan juga dilakukan di bidang mental spiritual yang diarahkan pada pengembangan manusia yang ulet, mandiri, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME.

Jika diamati dari praktik pembinaan melalui penyuluhan ketransmigrasian yang dilaksanakan oleh petugas lapangan urusan transmigrasi, dapat dikemukakan bahwa pengelolaan lahan yang telah diarahkan oleh pemerintah daerah selama ini memang secara normatif sudah berwawasan lingkungan, karena memperhatikan aspek kelestarian ekosistem lokal, seperti tanah, air, dan iklim sebagai modal dasar kehidupan transmigran. Hal ini dapat dilihat, misalnya, dari penentuan tanaman karet sebagai komoditas utama yang dibudidayakan di UPT Durian Amparan.

Dengan keserasian ekosistem yang saling membutuhkan, transmigran diharapkan dapat membentuk wilayah permukiman beserta sumber-sumber penghidupan bagi kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan. Namun demikian, sehubungan dengan pembinaan warga masyarakat dan permukiman transmigrasi, petugas lapangan penyuluhan transmigrasi selama ini hanya mendatangi lokasi transmigrasi pada waktu terbatas. Penyuluhan hanya diberikan mengenai kondisi lahan, cara praktis mengolah lahan, bagaimana

menangani lahan dengan tanaman karet, teknik memeliharanya, dan cara mengatasi hama penyakit.

Mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh transmigran di UPT Durian Amparan, Pemerintah Provinsi Bengkulu pada umumnya dan Pemerintah Bengkulu Utara pada khususnya perlu melakukan perencanaan kembali program transmigrasi yang telah dilaksanakan di UPT Durian Amparan tahun penempatan 2004, 2005 dan 2006 secara holistik dan terpadu. Mereka perlu melakukan pengorganisasian dengan koordinasi vertikal timbal-balik untuk merumuskan dan mengeluarkan kebijakan mengadakan dan menyerahkan lahan usaha I dan II yang seharusnya diberikan kepada transmigran sejak awal penempatan di UPT pada tahun pertama dengan orientasi kesejahteraan transmigran.

Akhirnya, mereka juga perlu melakukan evaluasi rutin berkala untuk memantau perkembangan transmigran di UPT. Mengingat transmigran selama ini telah menjalani kehidupan lebih dari lima tahun pertama sejak 2004, 2005 atau 2006, pemerintah kabupaten perlu bersikap proaktif untuk memperbaiki kebijakan yang ada agar transmigrasi yang dilaksanakan dapat berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya agar transmigran dapat terpenuhi rasa keadilannya setelah hampir satu dekade tidak mendapatkan haknya yang layak atas kepemilikan lahan produksi pertanian di UPT Durian Amparan sebagaimana dijanjikan oleh Pemerintah Daerah.

E. Kesimpulan dan Saran.

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi pemerintah dengan kebijakan afirmatif sangat diperlukan guna memberdayakan transmigran sebagai komunitas baru yang dibentuk dengan prakarsa pemerintah. Tanpa kebijakan afirmatif yang memadai,

khususnya melalui penyediaan akses terhadap berbagai aset penghidupan, mereka akan selalu kesulitan membangun basis-basis penghidupan dengan pilihan-pilihan strategi penghidupan yang berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan dinamis.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah melaksanakan program transmigrasi di UPT Durian Amparan dengan cara menyediakan lahan dan membangun sarana dan prasarana fisik seperti rumah tinggal, kantor petugas penyuluh transmigrasi, sekolah dan Puskesmas Pembantu (PUSTU), serta memberikan arahan penempatan dan pembinaan tentang penanaman karet. Akan tetapi, pelaksanaan program transmigrasi di UPT Durian Amparan dapat dikatakan tidak tepat dan kontinyu akibat lemahnya perencanaan dan pelaksanaan program yang tidak sesuai dengan prosedur transmigrasi, khususnya yang terkait dengan ketidaktepatan implementasi mekanisme penyerahan lahan usaha I (0,75 Ha) dan II (1 Ha).

- a. Program transmigrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2004 di UPT Durian Amparan sudah tidak tepat sejak awal, bahkan dalam proses penyediaan tanah. Pemerintah Daerah tidak menyediakan lahan rumah dan pekarangan secara tepat waktu, yaitu di awal penempatan, yang diperburuk lagi dengan tertundanya lahan usaha I seluas 0,75 Ha kepada transmigran, serta akhirnya tidak diberikannya lahan usaha II seluas 1 Ha sampai sekarang (2013).
- b. Ketidaksesuaian prosedur penyelenggaraan transmigrasi juga terlihat dari kurangnya pembinaan masyarakat transmigrasi sebagaimana diamanatkan Pasal 49 PP No. 2/1999, bahwa pembinaan masyarakat transmigrasi dalam mewujudkan desa transmigrasi dirancang dalam tiga tahap perkembangan, yaitu tahap adaptasi, pemantapan, dan

pengembangan. Dalam kenyataan, pembinaan di UPT Durian Amparan pada umumnya hanya dilakukan pada 2 tahun pertama, karena setelah gempa bumi 2007, petugas penyuluh transmigrasi sudah sangat jarang ke lokasi transmigrasi di UPT Durian Amparan.

- c. Perlunya mempertimbangkan peran intervensi pemerintah dalam pelaksanaan program transmigrasi, kajian geografis sangat perlu memasukkan dimensi kajian kebijakan yang jauh lebih komprehensif. Hal ini bertujuan agar aspek spasial, ekologi maupun kompleks wilayah yang diasumsikan mempengaruhi kesejahteraan maupun strategi penghidupan berkelanjutan dari transmigran dapat dijelaskan secara struktural dengan mempertimbangkan peran politis dan birokratis dari pemerintah.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut, maka bisa diajukan beberapa saran kebijakan sebagai berikut.

- a. Untuk kasus program transmigrasi yang dilaksanakan di UPT Durian Amparan tahun penempatan 2004, 2005 dan 2006, Pemerintah Prov Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara perlu segera melakukan koordinasi untuk merumuskan dan mengeluarkan kebijakan mengadakan dan menyerahkan lahan usaha II yang seharusnya sudah diberikan sejak awal penempatan transmigran di lokasi pada tahun pertama. Tujuannya agar transmigran dapat segera terpenuhi rasa keadilannya setelah hampir satu dekade tidak mendapatkan haknya yang layak atas kepemilikan lahan produksi pertanian di UPT Durian Amparan sebagaimana dijanjikan oleh Pemerintah Daerah.
- b. Untuk program transmigrasi yang akan diadakan di tahun-tahun yang akan

- datang, Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara hendaknya berkoordinasi dalam merumuskan kebijakan pengadaan lahan dan permukiman transmigrasi, sehingga lahan usaha I dan II dapat diserahkan kepada transmigran sejak awal penempatan transmigran di lokasi pada tahun pertama. Tujuannya agar mereka dapat mengelolanya sejak awal dan lebih mampu memenuhi kebutuhan jangka pendek, menengah maupun panjang dengan baik, khususnya setelah bantuan jatah hidup pemerintah pada tahun pertama selesai diberikan.
- c. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara hendaknya segera mengeluarkan kebijakan yang lebih progresif untuk dapat mengintegrasikan UPT Durian Amparan dengan konteks program transmigrasi di wilayah KTM Lagita. Tujuan integrasi ke dalam KTM Lagita ialah agar UPT Durian Amparan lebih cepat berkembang menjadi pusat pertumbuhan berbasis pertanian dan agroindustri, dilengkapi kawasan pengembangan agribisnis.
- d. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara beserta jajaran pemerintahan pada tingkat kecamatan dan desa hendaknya mengeluarkan kebijakan untuk mengintensifkan kembali petugas lapangan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan transmigran agar transmigran di UPT Durian Amparan dapat membangun basis strategi penghidupan yang lebih berkelanjutan dalam kerangka integrasi ke dalam KTM Lagita tersebut.
- Daftar Pustaka**
- Alfandi, W. 2001. *Epistemologi Geografi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Bintarto. 1991. *Geografi Konsep dan Pemikiran*. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM
- Bintarto dan Hadisumarno, S. 1987. *Metode Analisa Geografi.*, Jakarta: LP3ES.
- Faturochman, Wicaksono, B., Setiadi, dan Latief, S. 2004. *Dinamika Kependudukan dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada.
- Husodo, Siswono Yudo. 2003. *Transmigrasi: Kebutuhan Negara Kepulauan Berpenduduk Heterogen dengan Persebaran yang Timpang*. Jakarta: PT Tema Baru.
- Levang, P. 2003. *Ayo ke Tanah Sabrang*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Panayotou, T. 1994. "Economy and Ecology in Sustainable Development" in *The Society for Political and Economic studies* (ed) 1994. *Economy and Ecology in Sustainable Development*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 42/1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi
- Peraturan Pemerintah No. 2/1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per 25/Men/IX/2009 tentang Tingkat Perkembangan Permukiman dan Kesejahteraan Transmigran
- Ritohardoyo, Su. 2013. *Penggunaan dan Tata Guna Lahan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Soegiharto, Saraswati. 2009. *Transformasi Desa-Desa Transmigrasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Suparno, Erman. 2007. Paradigma Baru Transmigrasi: Menuju Kemakmuran Rakyat. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 15/1997 tentang Ketransmigrasian
- WCED (World Commission on Environment and Development). 1987. Our Common Future. Oxford. Oxford University Press.
- Yin, R.K. (2011). Studi Kasus: Disain dan Metode, Jakarta: RajaGrafindo Persada.